

“TINJAUAN HUKUM ATAS PERMUFAKATAN KARTEL HONDA DAN YAMAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999”

Cornelis Leo Lamongi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan larangan permufakatan menghambat peredaran barang/jasa berdasarkan Undang Undang No. 5 Tahun 1999 peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mendorong persaingan usaha yang sehat di sektor motor skuter matic serta penetapan harga sepeda motor skuter matik yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, termasuk kartel dan sistem pembuktian yang digunakan dalam menyelesaikan perkara dalam perspektif hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktek kartel merupakan pelanggaran yang sangat sulit untuk dibuktikan, dikarenakan kasus kartel jarang atau tidak memiliki bukti langsung (*hard evidence*). Karena hal tersebut, munculnya bukti tidak langsung (*indirect evidence*) sebagai alat bukti digunakan KPPU untuk memutus perkara kartel. Bukti tidak langsung yang digunakan pada kasus kartel sepeda motor ini adalah adanya pergerakan harga menunjukkan adanya tren yang sama diantara para terlapor. Hasil ini menyimpulkan bahwa adanya koordinasi antara kedua perusahaan dalam menentukan harga. Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2016 berkaitan dengan penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan otomotif terkenal. Perusahaan-perusahaan otomotif tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 5 mengenai penetapan harga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelusuran kepustakaan dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menyarankan perbaikan dalam meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha, meningkatkan edukasi, serta diberikan ruang bagi pembuktian tidak langsung untuk perkara persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

Kata Kunci : Penerapan Hukum, Kartel, Persaingan Usaha, Sekuter Matic

"LEGAL REVIEW OF THE CONTRACT OF HONDA AND YAMAHA CARDS BY LAW NUMBER 5 YEAR 1999"

Cornelis Leo Lamongi

Abstract

This study aims to find out how the provisions of the prohibition ban inhibit the circulation of goods / services based on Law no. 5 Year 1999 the role of Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in encouraging fair business competition in motor scooter matic sector and pricing of automatic scooter motorcycles resulting in unhealthy business competition, including cartel and evidentiary system used in solving case in competition law perspective business based on Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The cartel practice is a very difficult offense to prove, because the cartel case is rare or has no hard evidence. Because of this, the emergence of indirect evidence as evidence used by KPPU to decide the cartel case. The indirect evidence used in the case of this motorcycle cartel is that the price movement indicates a similar trend among the reported. These results conclude that there is coordination between the two companies in determining the price. KPPU's Decision No.04 / KPPU-I / 2016 relates to the pricing made by renowned automotive companies. The automotive companies have met the elements in Article 5 concerning pricing. The method used in this research is normative law research or library search in data collection. The results suggest improvements in improving supervision of business actors, improving education, and given room for indirect evidence for unhealthy business competition cases in Indonesia.

Keywords: Implementation of Law, Cartel, Business Competition, Scooter Matic